



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“ANALISIS PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN DESA
“(Studi Kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar) “**



OLEH:

**RESTU ADI PRATAMA
NIM : 11675101918**

**PROGRAM S.1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

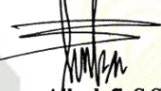
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Restu Adi Pratama
 Nim : 11675101918
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Desa
 (studi kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten
 Kampar)

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing


Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 712 075

Mengetahui,

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial


Dr. Drs H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 194903 1 003

Ketua Jurusan
 Administrasi Negara


Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Restu Adi Pratama
 Nim : 11675101397
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan
 Desa (studi kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung
 Kabupaten Kampar)
 Tanggal Ujian : 21 Juli 2020

Disetujui oleh,

Ketua Penguji

Dr. Kamaruddin. S.Sos M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I

Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji II

Irdavanti, S.IP, MA
NIK.130 411 030

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DESA (Studi Kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)

Oleh :

RESTU ADI PRATAMA

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Kenantan, kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, provinsi riau. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *Good Governance* didalam pengelolaan Desa di desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, 2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Desa di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang NO 6 Tahun 2016 tentang Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa kenantan dalam penerapan prinsip *Good Governance* didalam pengelolaan Desa belum sepenuhnya mampu untuk di terapkan. Jadi menyebabkan penerapan *Good Governance* tidak berjalan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas secara baik didalam pengelolaan desa. Pemerintah Desa seharusnya menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan desa lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat sejahtera. Dengan menggunakan UU NO 6 tahun 2016.

Kata kunci : Analisis, pelayanan publik, *Good Governance*, Pengelolaan Desa

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan rancangan proposal ini yang berjudul **“ANALISIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA”(Studi Kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)**”. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini di peruntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT. Telah kuselesaikan skripsi ini, yang akan kupersembahkan pada: Bapakku **Sariman** dan Ibuku **Wartini** Terimakasih atas do'a, kasih sayang, dukungan, kesabaran, keikhlasan, pengorbanan, serta perjuangan yang tak kenal lelah untuk anakmu ini Semua yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah bapak ibu lakukan rasanya tak akan dapat terbalaskan meskipun beribu ucapan terimakasih yang kuucapkan. Adikku tersayang **Revina Rahmadani** terimakasih telah menjadi motivasiku. Keluarga Besar yang selalu memberikan doa serta dukungannya Sahabat-sahabat Tercinta dan Teman-teman Seperjuangan Para Dosen dan Civitas Akademika Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan doa Almamaterku tercinta UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM. M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Jhon. Afrizal, S.HI, MA selaku sekretaris Program Studi Administrasi Negara Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak M.Rafi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku Ketua dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Untuk keluarga besar di Desa kenantan terimakasih telah memberikan perhatian, Motivasi, dukungan, dan doa yang membuat peneliti terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Keluarga Besar Administrasi D 2016 di Pekanbaru yang memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Keluarga Besar Administrasi Negara Angkatan 2016 yang memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Keluarga 2020 S.Sos di Pekanbaru yaitu Pratami Eka Putri, Ria Mardiyanti, Boby Frizia Aziz, Rifaldi, Agus Riadi, Dandy Julika, Afifah Harashta, Nofran Wahyuda Putera, Wahyudi Jamal, dan Hafiz Kemurata An Nawawi yang selalu semangat dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi

11. Untuk M. Ridho Zulfahmi, Vivi Sunarti kawan sepembimbing dan seperjuangan dalam pembuatan skripsi yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HMJ-ANA) periode 2016-2019

13. Kepada Keluarga Besar KKN Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar 2019.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis,

RESTU ADI PRATAMA
NIM. 11675101918



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. Analisis	13
2.1.1. Pengertian Analisis	13
2.2. Pelayanan Publik	14
2.2.1. Pengertian Pelayanan Publik	14
2.2.2. Azaz-azaz Pelayanan Publik.....	15
2.2.3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik.....	16
2.2.4. Standar Pelayanan Publik	19
2.3. Good Governance	20
2.3.1. Konsep <i>Good Governance</i>	20
2.3.2. Pengertian <i>Good Governance</i>	23
2.3.3. Prinsip <i>Good Governance</i>	25
2.3.4. Karakteristik <i>Good Governance</i>	30
2.3.5. Unsur-unsur <i>Good Governance</i>	31
2.3.6. Indikator <i>Good Governance</i>	32
2.4. Desa	37
2.4.1. Pengertian Desa	37
2.4.2. Struktur Pemerintah Desa.....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3. Pengelolaan Desa.....	41
2.5. Otonomi Desa	50
2.5.1. Pengertian Otonomi Desa.....	50
2.6. Perspektif Islam	52
2.7. Penelitian Terdahulu.....	56
2.8. Definisi Konsep	57
2.9. Konsep Operasional.....	58
2.10. Kerangka Pemikiran	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	60
3.2. Jenis dan Sumber Data	60
3.3. Metode Pengumpulan Data	61
3.4. Informen Penelitian	62
3.5. Analisis Data.....	63
BAB IV KETENTUAN UMUM	66
4.1. Kondisi Geografis Desa Kenantan	66
4.2. Sejarah Desa	67
4.2.1. Asal-usul Desa dan Sejarah Desa	67
4.3. Gambaran Demografi Desa Kenantan	70
4.4. Sistem Mata Pencarian Desa Kenantan	70
4.5. Agama dan Religi Masyarakat Desa Kenantan	71
4.6. Suku Bangsa di Desa Kenantan	71
4.7. Kesenian	72
4.8. Sistem Teknologi	72
4.9. Organisasi Sosial Masyarakat Desa Kenantan	73
4.10. Peta Desa Kenantan.....	73
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
5.1. Implementasi prinsip <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan desa (studi kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)	74
5.1.1. Transparansi (<i>transparation</i>).....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2. Partisipasi (<i>participation</i>)	84
5.1.3. akuntabilitas(<i>accountability</i>)	94
5.2. Faktor – faktor yang Menghambat Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan di Desa Kuantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	102
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	104
6.1. Kesimpulan	104
6.2. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam kegiatan pengolahan Desa Kenantan Kecamatan tapung Kabupaten Kampar	7
Tabel 2.1	Indikator Transparansi	33
Tabel 2.2	Indikator Partisipasi	35
Tabel 2.3	Indikator Akuntabilitas	37
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	56
Tabel 2.5	Konsep Operasional	58
Tabel 3.1	Informen Penelitian	63
Tabel 4.1	Geografis Desa Kenantan	66
Tabel 4.2	Demografi Desa Kenantan	70
Tabel 4.3	Mata Pencarian Masyarakat Desa Kenantan	70
Tabel 4.4	Agama dan Religi Masyarakat Desa Kenantan	71
Tabel 4.5	Suku Bangsa Masyarakat Desa Kenantan	71
Tabel 5.1	Prinsip <i>Good Governance</i> (sedarmayanti, 2009,289)	74
Tabel 5.2	APBDes Tahun 2019 Desa Kenantan	75
Tabel 5.3	Lebaga Masyarakat Desa Kenantan	85
Tabel 5.4	Pembangunan Desa Kenantan	85

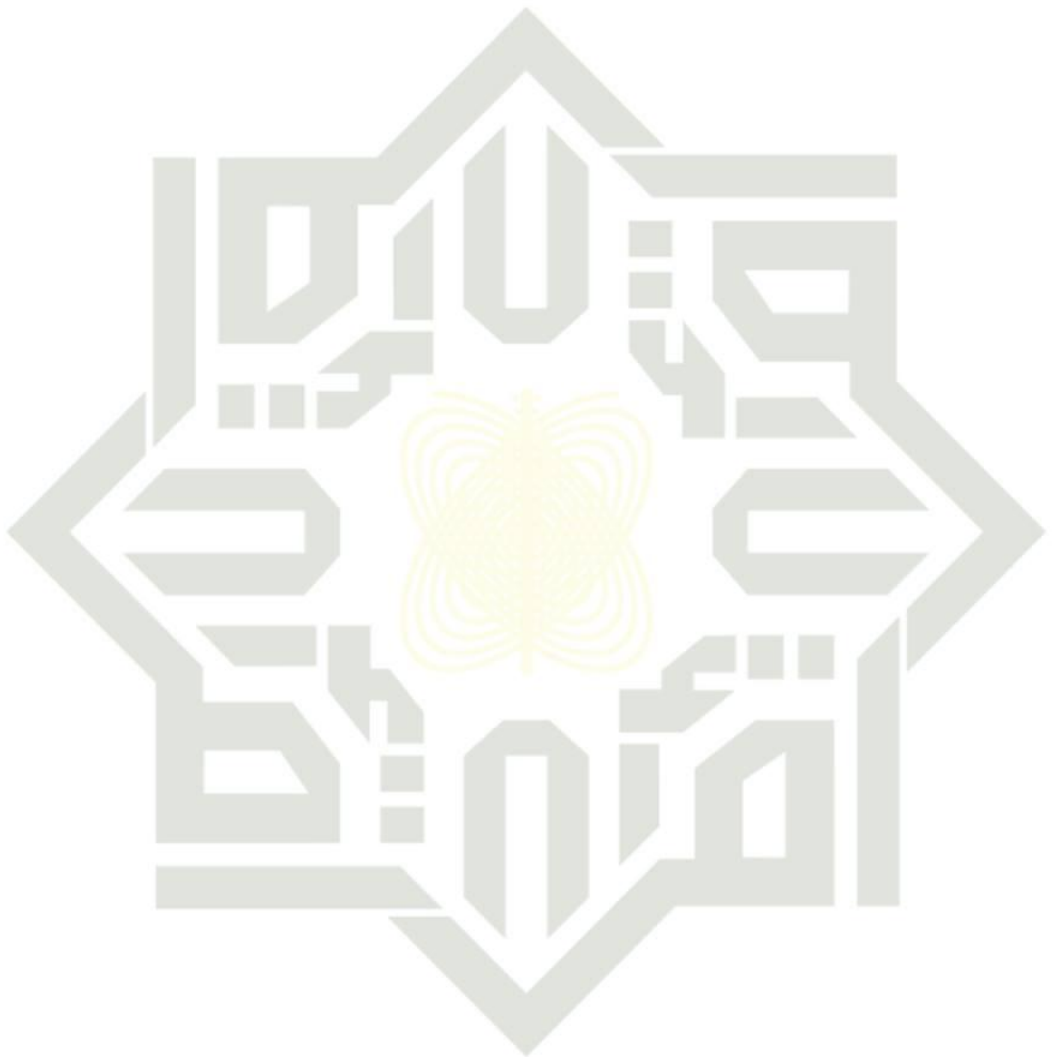


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	59
Gambar 4.1	Peta Desa Kenantan	73
Gambar 5.1	Transaransi APBDesa Menggunakan Baliho	75



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Informasi tersebut dikoordinasikan pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang

kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa (Febby Rosielita, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Ni Kadek Sinarwati Tahun 2017)

Dengan demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, pemerintah desa perlu memperhatikan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Good governance merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. *Government* sendiri memiliki arti sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Mereka menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara.

Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis pada tahun 1998 negara Indonesia telah memulai dengan berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *Good Governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Dengan kata lain Indonesia ingin membenahi dirinya dengan pencaangan *Good Governance* dilingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat (Irma Sanarty Purba dan Djanius Djamin Tahun 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. LAN juga menegaskan jika dilihat segi functional aspect, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga sinergi interaktif yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut UNDP (*United Nations for Development Program*) dalam Grindle (1997:3), *good governance* dapat diartikan sebagai :

“Ada beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi yang strategis. Pada dasarnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik semua prinsip *good governance* harus dapat diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Persoalan yang terjadi adalah masih terdapat kelemahan dalam pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance*”.

Menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tangilisan (115) ada prinsip-prinsip *good governance* meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*),
2. Penerapan hukum (*Fairness*),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Transparansi (*Transparency*),
4. Responsivitas (*Responsiveness*),
5. Orientasi (*Consensus Orientation*),
6. Keadilan (*Equity*),
7. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness*),
8. Akuntabilitas (*Accountability*),
9. Strategi Visi (*Strategic vision*)
10. Saling Keterkaitan

Pada dasarnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik semua prinsip *Good Governance* harus dapat diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Persoalan yang terjadi adalah masih terdapat kelemahan dalam pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Governance*.”

Dewasa ini, Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik, tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Desa saat ini berada dalam masa transisi kekuasaan akibat perubahan yang terjadi pada tingkat di atas Desa. Asumsinya adalah bahwa sepanjang Orde Baru

pemerintah Desa berada pada posisi terkooptasi oleh negara dan tidak otonom. Dalam perubahan sistem yang terjadi belakangan, pemerintah desa di beri ruang yang lebih luas melalui perombakan struktur dimana kontrol berada di tangan masyarakat (Agus Pramusinto dan M. Syahbudin Latief Tahun 2011)

Dalam pengelolaan desa memiliki 4 ruang lingkup pengelolaan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a) kedudukan, jenis desa dan penataan desa;
 - b) kewenangan desa;
 - c) penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d) hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa;
 - e) peraturan desa;
 - f) keuangan desa dan aset desa;
 - g) pembinaan dan pengawasan.
2. Pelaksanaan Pembangunan
 - a) pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
 - b) BUMDes dan kerjasama desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan
 - a) lembaga kemasyarakatan desa,
 - b) lembaga adat desa
4. Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Pendampingan

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi dan pasar yang efisien. Sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative. Untuk mencapai *good governance* ditegaskan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan, prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi, penerapan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, strategi visi dan saling keterkaitan. Jika suatu otonomi desa memiliki tata kelola yang baik wajib memenuhi 10 prinsip *good governance* tersebut.

Good Governance dapat terlaksana apabila prinsip *good governance* seperti partisipasi, penerapan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, strategi visi dan saling keterkaitan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam kondisi realitas, desa kenantan sendiri belum mampu menjalankan *good governance* dengan baik, belum mampu untuk memenuhi 10 prinsip *good governance* tersebut menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Tabel 1.1 Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam kegiatan pengelolaan Desa Kenantan Kecamatan tapung Kabupaten Kampar

No	Kegiatan berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i>	Keterangan
1	Peran Kepala Desa Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Belum Terlaksana
2	Berlaku adil dalam penerapan hukum	Terlaksana
3	Membuat baliho APBDesa	Terlaksana
4	Sosialisasi APBDesa ke masyarakat	Belum Terlaksana
5	Laporan pertanggung jawaban Dana Desa kepada masyarakat	Belum Terlaksana
6	Informasi dana desa, APBDes, dan data Desa melalui Website	Belum Terlaksana
7	Keadilan dalam keterlibatan pemerintahan	Terlaksana
8	Lembaga Desa menghasilkan sesuai dengan yang digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia	Belum Terlaksana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kegiatan berlandaskan prinsip <i>Good Governance</i>	Keterangan
9	Keputusan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan	Belum Terlaksana
10	Pembangunan penyediaan air bersih	Belum Terlaksana
11	Pembangunan perpustakaan Desa	Terlaksana
12	Kerjasama antar Desa di bidang keamanan	Belum Terlaksana

Sumber: kantor Kepala Desa 2020

Berdasarkan tabel diatas,tolak ukur yang digunakan untuk mengukur *good governance* menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tidak semuanya prinsip *good governance* dilaksanakan, ada beberapa hal yang belum terlaksana seperti :belum kelihatannya dalam memberikan informasi ataupun transparansi dalam mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dapat dipantau oleh masyarakat dengan cara sosialisasi dari sudut pandang masyarakat yang merasa susah ketika membutuhkan data, belum adanya website Desa untuk menegetahui soal dana desa dan APBDesa secara online dan dapat di akses masyarakat khususnya anak muda untuk mengetahui kegunaan dana Desa melalui Internet. Walaupun sudah memasang baliho APBDesa di depan kator Desa itu kurang efektif karna masyarakat memiliki kesibukan masing-masing untuk pergi melihat baliho tersebut.

Laporan pertanggung jawaban mengenai dana Desa juga belum terlaksana, Pemerintah Desa hanya memberikan laporan kepada BPD, Tokoh adat, RT, RW. Dalam kasus ini RT dan RW banyak yang tidak melaporkan pertanggungjawaban dana desa ke masvarakatnya, mereka tidak peduli dalam hal itu dan mengabaikannya, pemerintah Desa seharusnya berperan aktif dalam menindak lanjuti masalah tersebut agar setiap masyarakat dapat menerima laporan pertanggung jawaban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga-lembaga di desa kenantan juga belum mampu untuk melayani setiap stackholders, dan menggunakan sumber daya yang teredia sebaik mungkin. Belum mampu memanfaatkan SDM yang ada padahal memiliki kemampuan.

Pemimpin desa juga belum mampu merencanakan pembangunan apa yang diperlukan dan di butuhkan masyarakat dan tidak asal membangun dan akhirnya terbengkalai dan tdak digunakan. Pemerintah Desa belum mampu membangun penyediaan air bersih padahal penyedian air bersih sangat penting bagi kebutuhan mayarakat khususnya masyrakat miskin. Perpustakaan Desa juga belum mampu di bangun padahal perpustakaan Desa adalah salah satu tempat untuk masyarakat mencari informasi. Untuk mengetahui mekanisme tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip *good governance* yang solid, bertanggungjawab dan sejalan dengan demokrasi. Pemerintah Desa di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sudah mengaku melakukan prinsip *good governance*.

Melihat fenomena yang terjadi di Desa kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, penulis ingin membuktikan sesuai atau tidaknya serta benar atau tidaknya dalam pengelolaan desa telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang telah dijelaskan diatas serta telah sesuai dengan *good governance* (Pemerintahan Yang Baik).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang “**ANALISIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA (Studi Kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)** “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa pada Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa di Desa kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang konsep, konsep operasional/variabel penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi dan sebagainya.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan desa di desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan desa di desa kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Analisis

2.1.1 Pengertian Analisis

Menurut Spradley (Sugiyono, 2015:335) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Satori dan Komariyah, 2014:200).

Nasution dalam Sugiyono (2015:334) melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda.

Berdasarkan teori Goleman yang dapat mengidentifikasi tingkat kecerdasan emosional siswa dengan tingkat kecerdasan emosional tinggi, siswa dengan tingkat kecerdasan emosional sedang, dan siswa dengan tingkat kecerdasan emosional rendah, tes kemampuan pemecahan masalah matematika berupa soal uraian/essay untuk melihat kemampuan pemecahan

masalah matematika berdasarkan tahapan Wallas, serta wawancara terhadap subjek untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika.

2.2 Pelayanan Publik

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3).

Menurut Harbani Pasolong (2011:128) pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir dalam (Harbani Pasolong, 2011:128) mengatakan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Haibuan mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima.

Menurut Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 Pelayanan adalah suatu bentuk pelayanan Daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Publik atau pelayanan umum dapat di definisikan sebagai segala segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan BUMN dan BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto, 2005:5).

Menurut Batinggi (2001:12), pelayanan publik dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat khalayak umum. Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga Negara. Sedangkan menurut Agung Kurmiawan (Herbani, 2011:128) pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sadu Wasitiono dalam Handyaningrat (1994), pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

2.2.2 Azas-azas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara harus memenuhi azas pelayanan sebagai berikut (keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak

Tidak deskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-maing pihak.

2.3 Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggara, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Secara keseluruhannya akan dijelaskan dibawah ini.

Adapun prinsip pelayanan publik didalam Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :

- a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
- d. Kepastian waktu

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum

6. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4 Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang diberlakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan

2. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan

3. Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan

4. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

5. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang ditetapkan.

Good Governance

2.3.1 Konsep *Good Governance*

Nugroho (2008: 118) mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa bukan rahasia lagi pada saat berurusan dengan birokrasi selalu identik dengan hal yang merepotkan, berbelit belit, dan terkadang mengeluarkan biaya ekstra, serta praktik kolusi, korupsi dan nepotisme di tubuh pemerintahan. Gejala ketidakpercayaan publik itu yang memunculkan istilah *good governance* di Indonesia, hal ini dikarenakan tersumbatnya atau terbatasnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial terhadap pemerintah. *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan seperti yang dikemukakan Santosa (2008: 130), ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggaraan pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tjokroamidjojo dalam Sunarso (2013: 172) mengemukakan *governance* artinya memerintah, menguasai dan mengurus. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* disebut *governance* (pemerintah/ pemerintahan). Sedangkan praktik terbaik disebut *good governance* (pemerintahan yang baik).

Dalam konsep *good governance* yang dikemukakan Nugroho (2008: 118) adalah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada para *stakeholders*, yakni masyarakat luas.

Konsep *good governance* menurut Sedarmayanti (2009: 274), mengandung dua pemahaman, yaitu:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dan pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.
 - a. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara; orientasi ideal negara mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen konstituen/pemilihnya seperti: legitimasi, apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan masyarakat; akuntabilitas (kewajiban memberi pertanggungjawaban/ menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum/ pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak/ kewenangan untuk meminta keterangan/ pertanggungjawaban).

- b. Pemerintahan berfungsi ideal: secara efektif, efisien melakukan upaya pencapaian bernegara.

Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2009:

276) mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountabilty* (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devolution of power, and assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam buku Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) menyatakan bahwa *good governance* secara tersurat maupun tersirat tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi prinsip-prinsip: supremasi hukum, keadilan, transparansi, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesional, cepat tanggap, efektif dan efisien, berdaya saing, dan akuntabel (LANRI, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Pengertian *Good Governance*

Good governance berasal dari induk bahasa eropa latin, yaitu gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Good Governance adalah suatu sistem dan proses didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip “supermasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta memiliki komitmen tinggi terhadap tegaknya nilai-nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, pemerintahan yang baik, bertanggungjawab dan berdaya saing” (Bintoro tjokroamidjojo. 2000, dalam Syarifin dan Jubaedah 2005:91)

Menurut Rochman, 2000 dalam sedarmayanti 2013: 276: menyatakan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan non Negara dalam satu usaha kolektif. Lebih lanjut Rochman secara lebih khusus dalam konteks pembangunan, mendefinisikan *Governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan. *Good Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil (dengan syarat utama efisien) serta relatif merata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut kooiman, 1993 dalam sedarmayanti, 2013:277 menyatakan makna “*Governance*” serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and services. LAN juga menegaskan jika dilihat segi fungsional aspect, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga sinergi interaktif yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Menurut UNDP (*United Nations for Development Program*) dalam Grindle (1997:3), *good governance* dapat diartikan sebagai :“Ada beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas serta visi yang strategis. Pada dasarnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik semua prinsip *good governance* harus dapat diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Persoalan yang terjadi adalah masih terdapat kelemahan dalam pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat.

2.3.3 Prinsip *Good Governance*

Menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

1. Kepastian hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tangkilan (115) ada 10 prinsip-prinsip *good governance* meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*), setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penerapan hukum (*Fairness*), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azazi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*), transparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. Responsivitas (*Responsiveness*), lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. Orientasi (*Consensus Orientation*), *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. Keadilan (*Equity*), semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat didalam pemerintah.
7. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness*), proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apayang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*), para pembuat keputusan dalam pemerintah, sector swasta dan masyarakat sipil (*civil society*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. Strategi Visi (*Strategic vision*), para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang di perlukan untuk pembangunan semacam ini.
10. Saling Keterkaitan, bahwa keseluruhan ciri *Good Governance* tersebut diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, informasi semakin mudah di akses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas, dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada dua hal, yaitu terhadap pertukaran informasi yang di perlukan dalam pengambilan keputusan dan memperkuat keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan.

Prinsip *Good Governance* menurut Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (2007 : 12), yaitu:

1. Wawasan ke Depan (*Visionary*)
2. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)
3. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)
4. Tanggung Gugat (*Accountability*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
6. Demokrasi (*Democracy*)
7. Profesionalisme dan Kompetensi (*Profesionalism and Competency*)
8. DayaTanggap (*Responsiveness*)
9. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)
10. Desentralisasi (*Decentralization*)
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*)
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)
13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*).

Prinsip Good Governance menurut Prof. Dr. H. Bintoro Tjokroamidjojo,

MA tahun 2000:

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Keterbukaan
4. Kepastian hukum
5. Jaminan

Prinsip *Good Governance* menurut Bhatta, Gambir, 1996;

1. Akuntabiliitas
2. Transparansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keterbukaan
4. Kepastian Hukum
5. Manajemen Kompetensi
6. Hak Azasi Manusia

Menurut UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas KKN:

1. Kepastian Hukum
2. Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas

2.3.4 Karakteristik *Good Governance*

Lima karakteristik *Good Governance* menurut UNDP (1997):

1. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar (pemerintah, sektor swasta, masyarakat madani) untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
2. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi dari kualitas hasil.
3. Proses penguatan sendiri, system pengelolaan adalah kunci yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, member kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.

4. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian, dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
5. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar dan masyarakat madani. (Sedarmayanti, 2013:282)

2.3.5 Unsur-unsur *Good Governance*

Ada tiga unsur *Good Governance* menurut (Sedarmayanti, 2013,281), yaitu:

1. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sector swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor swasta: pelakor sector swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti Industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaran pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi.

Negara, sebagai salah satu unsur governance, didalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. **Sektor Swasta**, meliputi perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lain dipasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena mempunyai pengaruh terhadap kebijakan sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun informal. **Society**, meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

2.3.6 Indikator *Good Governance*

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2009:289).

1. Pengertian Transparansi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut *Transparency International*, undang-undang *Freedom of Information* (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Krina (2003: 19).

Indikator Transparansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi *kebijakan* pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289).

Tabel 2.1 Indikator Prinsip Transparansi

Dimensi	Indikator
Transparansi (<i>Transparency</i>)	1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
	2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
	3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
	4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Sumber: Sedarmayanti (2007:22)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Partisipasi

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290). Partisipasi berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga pengembangan atau perluasannya.

Indikator Partisipasi

Oleh karena partisipasi merupakan prinsip mendasar dari *good governance*, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Table.2.2 Indikator Partisipasi

Dimensi	Indikator
Partisipasi (<i>Participation</i>)	1. Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif.
	2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.
	3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.
	4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah..
	5. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah

Sumber: Sedarmayanti (2007:16-22).

3. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89).Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas.Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*).Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan. Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator Akuntabilitas

Oleh karena *good governance* berpegang pada akuntabilitas, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3 Indikator Prinsip Akuntabilitas

Dimensi	Indikator
Akuntabilitas (Accountability)	1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
	2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
	3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	4. Berkurangnya kasus-kasus KKN

Sumber: Sedarmayanti (2007:23)

Prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*. Penerapan *Good Governance* kepada pemerintah merupakan mandat, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian *Good Governance* adalah membangun pemerintahan yang profesional dan mempunyai ilmu pengetahuan sehingga mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan tersebut menjadi skill dan berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

Desa

2.4.1 Pengertian Desa

Pemahaman makna mengenai Desa, dapat ditemui dari berbagai sudut pandang, di sesuaikan dengan keperluan pengkajian terhadap desa itu sendiri. Desa dapat dipandang dari sudut pemahaman orang umum (awam) atau pengertian

sehari-hari, dapat pula dipandang dari sudut sosiologis, hukum dan politik, ketatanegaraan/ pemerintahan dan sebagainya.

Menurut orang umum/awam, desa merupakan suatu tempat atau wilayah yang didiami oleh sekelompok penduduk yang umumnya bercirikan, antar lain: mata pencarian bertumpu pada sektor pertanian, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif terbatas dan sering dipahami sebagai suatu kondisi yang bertolak belakang dengan wilayah kota atau suasana perkotaan, terutama dari aspek keberadaannya.

Secara sosiologis desa diasosiasikan sebagai suatu kesatuan masyarakat yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam ikatan kekerabatan yang kental. Menurut Surianingrat, 1981. (dalam tesis Firmanudin 2005:10). “merupakan bentuk tertua dari susunan kesatuan masyarakat yang ada dalam peradaban bangsa Indonesia”.

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, desa dapat dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat yang hidup dan menyelenggarakan tata kehidupan desanya berdasarkan kaidah norma dan aturan hukum yang telah disepakati bersama dan memiliki kuasa (wewenang) untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya dalam bingkai pemerintahan yang mandiri. Desa mengandung makna sebagai kesatuan hukum dimana bertempat suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri (STPDN, 1999 dalam Tesis Firmanudin 2005:10).

Sedangkan dipandang dari sudut ketatanegaraan atau pemerintahan, desa dipahami sebagai bagian dari organisasi kekuasaan Negara atau pemerintahan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sub sistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sejalan dengan yang di kemukakan oleh Pratikno dalam Julianoro (Ed) (2002:1320) bahwa : “Desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintah atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara”.

Desa didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum ataupun entitas sosial politik yang bukan hanya berhak namun juga mampu mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingannya sendiri (Purwo, 2006: 239). Undang-undang No 6 tahun 2014 mengenai Desa menyatakan bahwa desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari oleh dan untuk rakyat. Jadi segala penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan kemandiriannya, prakarsa, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Hanif Nurcholis (2001:1) menyebutkan desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widjaja (2003:4), secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Menurut Widjaja (2003:3), menyatakan bahwa desa adalah sebagaikesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkanhak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenaiPemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilaayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4.2 Struktur Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 20 bahwa “ Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.” Jadi, dalam struktur pemerintah desa itu ada Kepala Desa dan Perangkat Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Selanjutnya pada Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan : “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.” Jadi perangkat desa adalah Pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 48.

“Perangkat desa terdiri atas :

1. Sekretaris desa,
2. Pelaksana kewilayahan, dan
3. Pelaksana teknis. “

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

2.4.3 Pengelolaan Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 pengelolaan desa dibagi menjadi 4 ruang lingkup, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Kedudukan, Jenis Desa dan penataan Desa

Pada pasal 5-6 UU No.6 /2014 disebutkan bahwa desa berkedudukan diwilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri dari atas Desa dan Desa adat. Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan di daerah setempat.

Pada pasal 7 UU No.6 /2014 disebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa sebagaimana yang di maksudkan yaitu:

- 1) Pembentukan;
- 2) penghapusan;
- 3) penggabungan;
- 4) perubahan status; dan
- 5) penetapan desa.

b. Kewenangan Desa

Pada pasal 18–19 UU No.6 /2014 disebutkan kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- 2) Kewenangan lokal berskala desa,
- 3) Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada pasal 23–24 UU No.6 /2014 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan asas : Keapastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pada penjelasan UU No.6 /2014, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat sebanyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

d. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

Pasal 67 (1) UU No.6 /2014 Desa berhak:

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 67 (2) UU NO.6 /2014 Desa berkewajiban:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan Desa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68 (1) UU No.6 /2014 Masyarakat Desa berhak:

- 1) Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- 3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 4) Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, dan anggota LKD;
- 5) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 68 (2) UU No.6 /2014 Masyarakat Desa berkewajiban:

- 1) Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - 2) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - 3) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa;
 - 4) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - 5) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
- e. Peraturan Desa

Pada pasal 69 UU No. 6 /2014 disebutkan jenis peraturan yang ada di Desa, selain peraturan Desa adalah peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- 2) Terganggunya akses terhadap pelayanan public;
- 3) Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- 5) Diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender

f. Keuangan Desa dan Aset Desa

Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana di maksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Sedangkan Aset Desa ialah dapat berupa tanah kas Desa, tanh ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik Desa. Selanjutnya ketentuan mengenai keungan Desa dan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam perundang-undangan.

g. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemerintahan, pemerintah Daerah Provinsi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur dalam pasal 112 – 115 UU No.6 /2014.

2. Pelaksanaan Pembangunan

a. Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong.

Pada penjelasan UU No.6 /2014 disebutkan bahwa pendekatan pembangunan Desa yang menjadi spirit UU ini, menggunakan 2 pendekatan, yaitu Desa Membangun dan Membangun Desa. Yang diintegrasikan dalam perancangan dan pembangunan Desa.

b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kerjasama Desa

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution), sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local (barang dan jasa) ke pasar.

Pada pasal 91 UU No.6 /2014 menyebutkan Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antar Desa meliputi:

- 1) Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- 2) Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan
- 3) Bidang keamanan dan ketertiban

Kerja sama antar Desa dituangkan dalam peraturan bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.

Kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa. Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Pembinaan Kemasyarakatan

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti RT, RW, pembinaan sejahtera keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).

Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

b. Lembaga Adat Desa

Pada pasal 95 UU No.6 /2014 disebutkan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari suunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan pihak ketiga. Kemudian pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar Desa, forum kerjasama Desa, dan kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan pada umumnya.

a. Pendampingan

Pemerintah dan Pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

2.5 Otonomi Desa

2.5.1 Pengertian Otonomi Desa

Otonomi Desa menurut Beratha (1991:124) merupakan otonomi yang tumbuh atau berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan peradabannya, serta diperoleh secara tradisional atau bersumber dari hukum adat (asli Indonesia), perwujudannya tercermin dalam tata kehidupan masyarakat atau pemerintahan Desa adat.

Sedangkan menurut Zakaria 2001 (dalam tesis firmanudin 2005:10) mengemukakan bahwa: Bila dilihat dengan menggunakan pendekatan teori politik hukum, otonomi Desa identik dengan, atau dapat digolongkan ke dalam hak yang bersifat bawaan, yakni hak yang telah tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam suatu kelembagaan (institution) yang merupakan urusan rumah tangga sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut :

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena

ini, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

2.6 Perspektif Islam

Islam sendiri telah mulai mengenalkan sistem pemerintahan sejak zaman Nabi di antaranya:

1. Nabi : Teokrasi (pemerintahan Tuhan yang dilaksanakan oleh Nabi)
2. Sahabat : Teodemokrasi (nilai-nilai ketuhanan yang ada pada sahabat)
3. Umayyah : Monarki (kerajaan)
4. Abasiyah : Monarki
5. Turki Utsmani : Monarki

Kemudian diubah oleh Kamal At-Taturk menjadi *Republik*

Di situ kita dapat melihat perubahan sistem pemerintahan yang ada dalam perkembangan islam, pada zaman nabi dapat dipastikan kebenarannya, karena langsung mendapat bimbingan Tuhan, namun pada zaman sahabat bisa saja salah karena ijtihad, apalagi zaman setelahnya. Padahal itu yang menjalankan adalah islam. Banyak sekali rupanya sistem pemerintahan yang pernah digunakan oleh

umat islam terdahulu, yang mana itu semua membawa perkembangan umat islam hingga kita semua bisa merasakannya.

Dalam surat An-Nisa' 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Amanah di sini artinya semua manusia bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi tugasnya di muka bumi ini. Di sinilah letak amanah berfungsi sebagai kenyamanan, Karena akan memberikan keamanan bagi umat manusia walaupun dengan beragam agama.

Good governance baru muncul pada era reformasi birokrasi. Namun terdapat ayat yang mengidikasikan adanya persoalan *good governance* dalam ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah swt dalam surah alhajj/ QS.22:41: yaitu;

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut mengindikasikan adanya persoalan good governance dalam pandangan fikih, karena penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan keamanan dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian ayat tersebut merumuskan good governance dengan tiga aspek, yaitu; (1) spiritual governance, (2) economic governance (3) political governance.

Didalam keberhasilan *Good Governance* harus memenuhi 3 prinsip utama yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas.

1. Transparansi

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ أَن ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am: 152)

2. Partisipasi

Dalam pandangan islam asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 159, yang berbunyi:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal

3. Akuntabilitas

Dalam prinsipnya akuntabilitas sejalan dengan transparansi yang mana harus disampaikan secara terbuka apabila mengetahui kebenarannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 42, yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا لِلْحَقِّ غَافِلِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu

mengetahui. (QS. Al-Baqarah:42) Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah:43)

Dalam pelaksanaan prinsip good governance di dalam pengelolaan Desa, Pemerintah Desa harus bertanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan good governance dan pembangunan Desa untuk kemajuan desa menjadi lebih baik.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dan perbandingan terhadap penelitian ini yaitu:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Febby Rosielita, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Ni Kadek Sinarwati/2017	Implementasi good governance pada pengelolaan pendapatan dan belanja Desa (studi kasus Desa Telaga, kecamatan Busungbiu, kabupaten Buleleng)	prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telaga sudah diterapkan cukup baik oleh pemerintah desa Telaga meskipun masih ada prinsip yang belum diterapkan secara optimal, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.
	Ni Putu Rika Raheni, I.G.A.M Ari Dwija Putri/2019	Pengaruh good governance dan Budaya Organisasi Pada kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar.	Good Governance berpengaruh positif pada kinerja aparatur penyelenggara pemerintah desa di kota denpasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan definisi konsep karya

ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.
2. Pelayanan Publik adalah sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima.
3. *Good Governance* adalah suatu sistem dan proses didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip “supermasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta memiliki komitmen tinggi terhadap tegaknya nilai-nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, pemerintahan yang baik, bertanggungjawab dan berdaya saing”
4. Desa merupakan suatu tempat atau wilayah yang didiami oleh sekelompok penduduk yang umumnya bercirikan, antar lain: mata pencarian bertumpu pada sektor pertanian, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif terbatas dan sering dipahami sebagai suatu kondisi yang bertolak belakang dengan wilayah kota atau suasana perkotaan, terutama dari aspek keberadaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Otonomi Desa Bila dilihat dengan menggunakan pendekatan teori politik hukum, otonomi Desa identik dengan, atau dapat digolongkan ke dalam hak yang bersifat bawaan, yakni hak yang telah tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam suatu kelembagaan (institution) yang merupakan urusan rumah tangga sendiri

Konsep Operasional

Indikator yang peneliti gunakan bersumber dari faktor utama keberhasilan penerapan prinsip *Good Governance* (sedarmayanti, 2009:289), yaitu:

Tabel 2.5 Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub indicator
Faktor-faktor utama keberhasilan penerapan prinsip Good Governance (Sedarmayanti, 2009:289).	Partisipasi (participation)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemahaman tentang proses atau metode partisipatif 2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama. 3. Meningkatnya kritik dan saran untuk pembangunan dasa. 4. perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. 5. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dasa.
	Transparansi (transparency)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi yang memadai pada proses kebijakan desa. 2. Adanya akses pada informasi 3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap pemerintahan dasa. 4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
	Akuntabilitas (accountability)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan 2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan

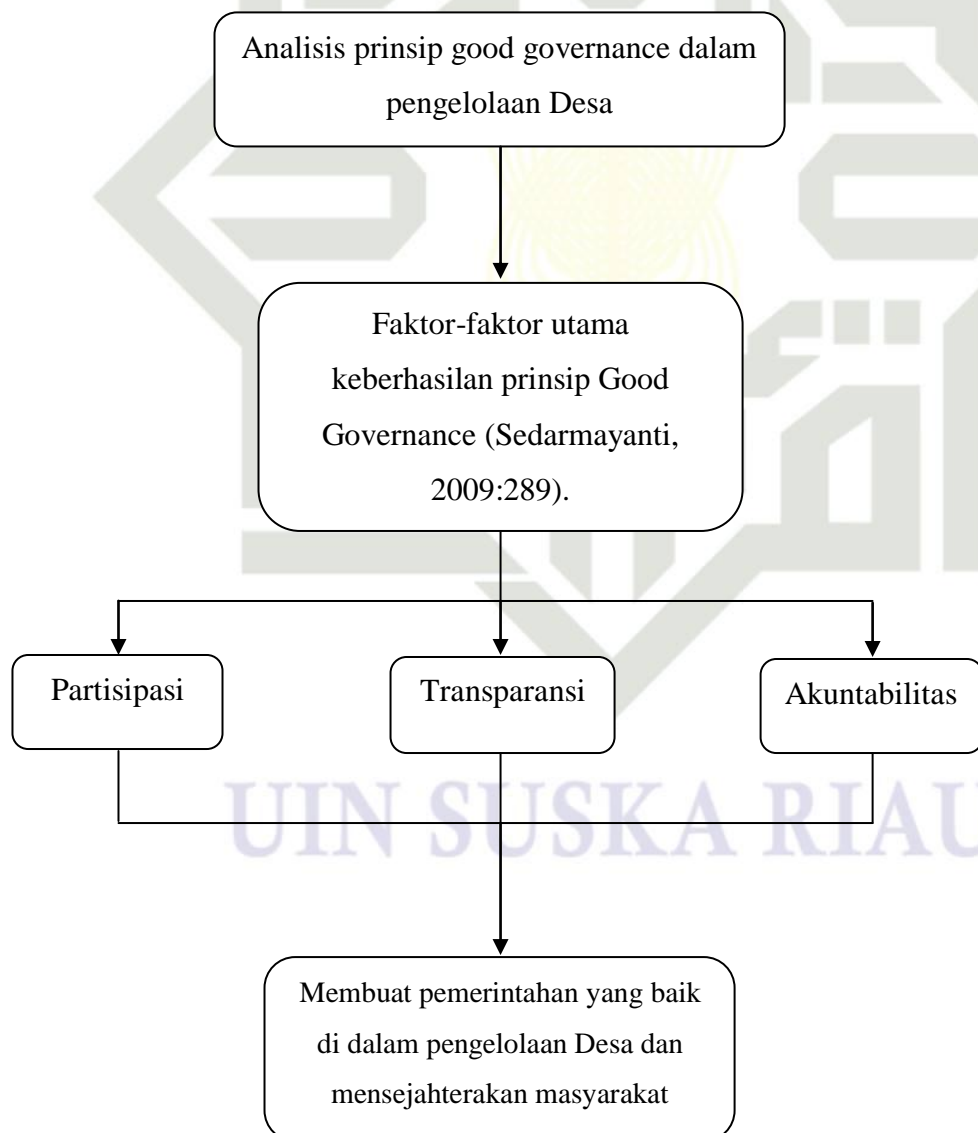
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Referensi	Indikator	Sub indicator
		atau kelalaian.
		3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat
		4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
		5. Berkurangnya kasus-kasus KKN

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu mulai dari bulan Oktober 2019 sampai Januari 2020 dan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bodgan & Taylor dan Moelong (2007) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu penelitian deskriptif dijelaskan oleh Zuriah (2009) sebagai penelitian yang diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Data primer, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu; Pemerintahan Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.
- 2) Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dipublikasikan. Data Sekunder ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan buku.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. Wawancara dan Interview

Teknik ini merupakan suatu jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (*interview*) dengan informan yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam proses wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang memuat garis-garis pokok pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab terhadap narasumber yang dianggap mengetahui dan dapat memberi informasi tentang implementasi Good Governance dalam pengelolaan Desa di Desa Kenantan, yaitu pegawai pemerintahan Desa di Desa Kenantan dan masyarakat Desa Kenantan. Wawancara digunakan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana implementasi Good Governance dalam pengelolaan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Observasi merupakan metode dasar dalam pengumpulan data yang bersifat non verbal atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mengamati berbagai keadaan, kegiatan dan peristiwa yang terjadi sesuai dengan kenyataan. Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk menggali data berupa dari sumber data yang berupa peristiwa tempat atau lokasi, benda-benda serta rekaman gambar-gambar. (HB. Sutopo, 2006:64)

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan desa di desa Kenantan.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber tertulis. Data diperoleh secara tidak langsung, yaitu dapat berupa catatan, berita, buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan dokumen resmi institusi (arsip) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dipergunakan sebagai pendukung dan pelengkap data yang diperlukan dalam penelitian.

Informen Penelitian

Informen penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi

kepada peneliti :

Tabel 3.1 Informen Penelitian

No.	Kriteria
1.	Pegawai pemerintahan Desa Kenantan
2.	BPD
3.	Tokoh Masyarakat Desa Kenantan

Penentuan subjek diatas dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih informan yang paling mengetahui bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pengeelolaan Desa di Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

3.5 Analisis Data

Sebagian besar data dari penelitian ini merupakan data kualitatif, maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang tujuannya untuk memperoleh gambaran secara khusus yang bersifat menyeluruh mengenai apa yang tercakup dalam permasalahan yang terdapat dilapangan saat pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dianggap relevan adalah dengan menggunakan model analisis interaktif, yaitu model yang memerlukan tiga komponen yang berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu sama lain secara sistematis.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan dan abstraksi data kasar yang diperoleh dilapangan. Dalam hal ini, reduksi data dilakukan dengan menelaah data yang terkumpul dari berbagai sumber, dilanjutkan dengan pemilahan data yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendak dibuang, dipertajam, disederhanakan serta dikembangkan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dikelompokkan sesuai ini permasalahan. Hal tersebut dilakukan dengan mereduksi data dari lapangan yaitu dengan menulis secara rapi terperinci dan sistematis untuk memperoleh keterangan serta data-data yang dibutuhkan dalam menyusun hasil dan analisis penelitian. Dari kegiatan tersebut dihasilkan pemikiran-pemikiran yang selanjutnya disusun sedemikian rupa sehingga mempermudah dalam penarikan simpulan penelitian. Proses reduksi ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka proses selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi, kemudian disusun dan digabungkan menjadi suatu bentuk deskripsi informasi yang menarik, logis, dan jelas alur pikirnya. Sajian ini merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga apabila dibaca akan mudah dipahami tentang berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Pada permulaan pengumpulan data dapat dilakukan analisa atau pernyataan yang mungkin terjadi, kemudian disusun sebab dan akibat yang mungkin dapat muncul, serta proporsi untuk memberikan pengertian mengenai arti-arti dari hal-hal yang ditemui di lapangan kemudian dapat

ditarik suatu simpulan. Setiap simpulan yang ditetapkan perlu diverifikasi terus menerus hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KETENTUAN UMUM

4.1 Kondisi Geografis Desa Kenantan

Desa Kenantan merupakan Desa yang memiliki daerah dataran rendah yang memiliki topografi datar dan sedikit bergelombang. Secara keseluruhan wilayah Desa Kenantan jika dilihat dari ketinggian, rata-rata daerahnya berada pada ketinggian 350 diatas permukaan laut. Berdasarkan rata-rata ketinggian daerah ini umum nya lingkungan alam Desa Kenantan identik dengan areal perkebunan kelapa sawit. Desa Kenantan memiliki suhu rata-rata 32 derajat celcius.

Pembagian musim di daerah ini relative sama dengan pembagian musim yang berlangsung di wilayah Negara Indonesia lainnya yang dipengerahi 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau, pengaruh musim ini juga berpegaruh terhadap kegiatan dan aktifitas masyarakat. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1: Geografis Desa Kenantan

No	Uraian
1	Luas wilayah : 12,5 Km²
2	Batas wilayah :
3	Topografi
4	Klimatologi :
7	Luas lahan pertanian
8	Luas lahan pemukiman : 250 Ha

Desa Kenantan terletak di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hingga saat ini akses transportasi umum menuju Desa Kenantan dari ibukota Kecamatan Tapung, yaitu Petapahan ke Desa Kenantan sekitar 10 Menit Perjalanan dengan jarak sekitar 5(Lima) kilometer menggunakan kendaraan

pribadi. Jika perjalanan dilakukan tanpa kendaraan bermotor / berjalan kaki membutuhkan waktu sekitar 45(Empat Puluh Lima) Menit.

Kemudian perjalanan dari ibukota Kabupaten Kampar, yaitu Kota Bangkinang menuju Desa Kenantan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 50 (lima Puluh) Menit menggunakan kendaraan pribadi dengan jarak sekitar 25(dua puluh lima) kilometer. Jika perjalanan dilakukan tanpa kendaraan bermotor / berjalan kaki, membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) jam 15 (lima belas) menit.

Sementara itu dari ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru menuju Desa Kenantan dapat diakses melalui jalan darat sekitar 1 (satu) jam 26 (dua puluh enam) menit menggunakan kendaraan pribadi dengan jarak sekitar 57(lima puluh tujuh) kilometer. Jika perjalanan dilakukan tanpa kendaraan bermotor atau dengan berjalan kaki membutuhkan waktu 10 (sepuluh) jam perjalanan

4.2 Sejarah Desa

4.2.1. Asal-usul Desa dan Sejarah Pemerintahan Desa

Desa Kenantan adalah nama suatu wilayah di kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Desa Kenantan mulai terbentuk pada tahun 1991 melalui program pemerintah transmigrasi pola PIR dengan transmigran mayoritas dari pulau jawa sebanyak 400 kepala keluarga (KK) dan 100 kepala keluarga (KK) dari penduduk lokal petapahan sehingga jumlah penduduk transmigran di wilayah desa Kenantan mencapai 500 kepala keluarga (KK).Pemukiman baru pada saat itu dipimpin oleh kepala unit pemukiman (KUPT) dari departemen transmigrasi yang bernama bapak Mirzal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah yang digunakan untuk lokasi desa Kenantan berasal dari wilayah tanah ulayat desa Petapahan yang kemudian ditata oleh pemerintah dengan program Transmigrasi. Diakhir tahun 1994 pengelolaan desa dalam rangka persiapan desa definitif diadakan pemilihan kepala desa yang pertama masih bersifat PJS (Pengganti Jabatan Sementara). pada saat itu pemilihan PJS di desa Kenantan dimenangkan oleh bapak Slamet Riyadi dan bapak Sogiman sebagai sekdes dari salah satu 3 calon yang tampil.

Pada pemerintahan (PJS) kepala desa pertama ini, kegiatan pemerintahan Kenantan terfokus pada penataan lembaga kelompok masyarakat mulai dari pembagian RT dan RW yang kemudian berkembang dan terhimpun dalam wilayah dusun. Disamping pembagian kelompok lingkungan juga diadakan pembagian kelompok2 pertanian di kelompok tani, kegiatan kelompok masyarakat pada saat itu sebagian besar bekerja pada sektor perkebunan dan sebagian kelompok lain pada sektor pertanian, dari kelompok-kelompok itu 26 kelompok tani yang masih aktif hingga saat ini.

Setelah satu periode (5 tahun) bertepatan dengan selesainya masa pembinaan transmigrasi berakhir juga masa jabatan PJS sebagai kepala desa, diakhir tahun 1999 berlangsung penyerahan pembinaan desa dari Departemen Transmigrasi kepada pemerintahan daerah dan status desa Kenantan menjadi desa definitif dibawah pembinaan pemerintah daerah dalam lingkup departemen dalam negeri.

Pasca serah terima pembinaan antara 2 departemen diadakan pemilihan kepala desa yang ke dua kali atau pemilihan kepala desa secara definitif yang

pertama, dari ke tiga calon kepala desa terpilih yang memimpin desa adalah bapak Ruslan dan bapak Sogiman sebagai Sekdes. Dalam 8 tahun pemerintahan kepala desa bapak Ruslan berakhir pada tahun 2007 dilanjutkan dengan pemilihan kepala desa yang ke 3 atau pemilihan kepala desa definitif yang ke-2.

Dari ketiga calon kepala desa mulai menapak langkah ditengah-tengah masyarakat dengan penyampaian visi dan misi kedepan Desa Kenantan agar lebih maju, yang terpilih pada pemilihan kepala desa yang ke-2 ini yaitu Bapak Heri Suprianta dan Sekdes adalah Bapak H. Sugima, dengan periode 2008-2013.

Setelah bapak Heri Suprianta selesai menjabat pada tahun 2013 diangkat PJS kepala desa yaitu Bapak H. Sugiman yang berakhir pada 30 Maret 2014 dengan disahkan nya undang-undang No. 6 2014 tentang status Kepala harus dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dari pemerintahan Kabupaten atau Kota maka posisi kepala desa di gantikan oleh Bapak H. Danil Eriajid, Sh yang dipilih oleh Kecamatan Tapung di Desa Kenantan sesuai dengan SK Bupati No. 04/DPMD tanggal 20 April 2015 hingga terpilihnya kepala Desa definitif yang dilaksanakan pemilihan kepala desa Serentak dan bergelombang pada tanggal 11 November 2015 dengan calon sebanyak 3 orang yaitu Bapak Surotro, Bapak Abdul Hanif dan Bapak Sugimin.

Pada pemilihan itu Bapak Abdul Hanif unggul 607 suara dari calon lainnya, maka terpilihlah bapak Abdul Hanif sebagai Kepala Desa periode 2015-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Gambaran Demografi Desa Kenantan

Masyarakat Desa Kenantan yang luas wilayahnya 12,5 Km². Dengan rincian jumlah penduduk 2.239 jiwa, dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 553 jiwa. Jumlah laki-laki 1.182 jiwa, jumlah perempuan 1.057 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Demografi Desa Kenantan

Uraian	Jumlah
A. JumlahPenduduk (Jiwa)	2.239
B. Jumlah KK	553
C. Jumlahlaki-laki	1182
D. Jumlahperempuan	1057

4.4 Sistem Mata Pencarian Masyarakat Desa Kenantan

Tabel 4.3 : Mata pencarian Masyarakat Desa Kenantan

Mata Pencarian	Laki-laki	Perempuan
Bidan Swasta	1	6
Buruh Tani	189	-
Karyawan Perusahaan swasta	-	2
Pedagang	22	-
Pegawai Swasta	25	-
Guru	23	-
Petani	307	-
Peternak	3	-
PNS	16	5
Tukang Bangunan	29	-
Karyawan Kebun	31	5
Total	646	18
Jumlah Total	664	

Mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani semenjak mereka datang transmigrasi ke Desa Kenantan dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan

akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani. Hal itu juga didukung oleh perkebunan kelapa sawit yang banyak dimiliki oleh masyarakat Desa Kenantan.

4.5 Agama dan Religi Masyarakat Desa Kenantan

Ada berbagai agama yang di anut oleh masyarakat Desa Kenantan, maka Mayoritas penduduk di Desa Kenantan menganut agama islam yaitu 97,6%. Ada juga masyarakat yang non-muslim. Di desa kenantan memiliki 2 Masjid dan 12 Mushalla yang dimiliki di Desa Kenantan.

Tabel 4.4 : Data Agama dan Religi Masyarakat Desa Kenantan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1150	1025
Kristen Protestan	4	5
Khatolik	28	27
Hindu	-	-
Budha	-	-
konghucu	-	-

4.6 Suku Bangsa di Desa Kenantan

Desa kenantan adalah desa yang di bangun untuk masyarakat transmigrasi, maka banyak masyarakat yang beranekaragam suku dan etnis yang menepati Desa Kenantan. Beberapa di antaranya adalah:

Tabel 4.5 : Data Suku Bangsa di Desa Kenantan

Suku	Laki-laki	Perempuan
Aceh	11	13
Jawa	1054	932
Kubu	1	2
Madura	2	1
Mentawai	2	3
Minang	7	10
Sunda	105	96
Jumlah		2239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Kesenian

Pada umumnya kesenian yang ada di Desa Kenantan berbagai macam, mengingat banyaknya suku atau etnis yang berdatangan ke Desa Kenantan, seperti adanya kesenian seperti: kuda lumping, reog ponorogo, dll. Di Desa Kenantan juga mempunyai beberapa grup musik tradisional milik kelompok. Selain itu juga ada beberapa studio musik modern. Alat – alat musik tradisional yang ada di Desa Kenantan merupakan milik suatu kaum atau suku, yang hanya digunakan pada acara tertentu.

4.8 Sistem Teknologi

Masyarakat Desa Kenantan dalam sistem Teknologi telah banyak kemajuan, bahkan sudah jarang menggunakan teknologi tradisional, sistem teknologi dalam komunikasi pada umumnya bahkan merata masing – masing individu telah menggunakan teknologi Handphone, bahkan anak-anak juga telah mempunyai 1 perangkat alat tersebut, selain itu hampir masyarakat Desa Kenantan juga telah banyak bisa mengopersikan komputer dan internet, ini dibuktikan dengan adanya beberapa warnet (warung internet) di wilayah Desa Kenantan. Dalam transportasi masyarakat Desa Kenantan banyak menggunakan mobil dan motor pribadi. Dalam pertanian teknologi modern belum ada digunakan. Semua masih menggunakan teknologi tradisional, seperti dengan egek, Dodos dan angkong untuk mengambil buah sawit dan membawa buah sawit. Dan membajak ladang masih menggunakan cangkul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

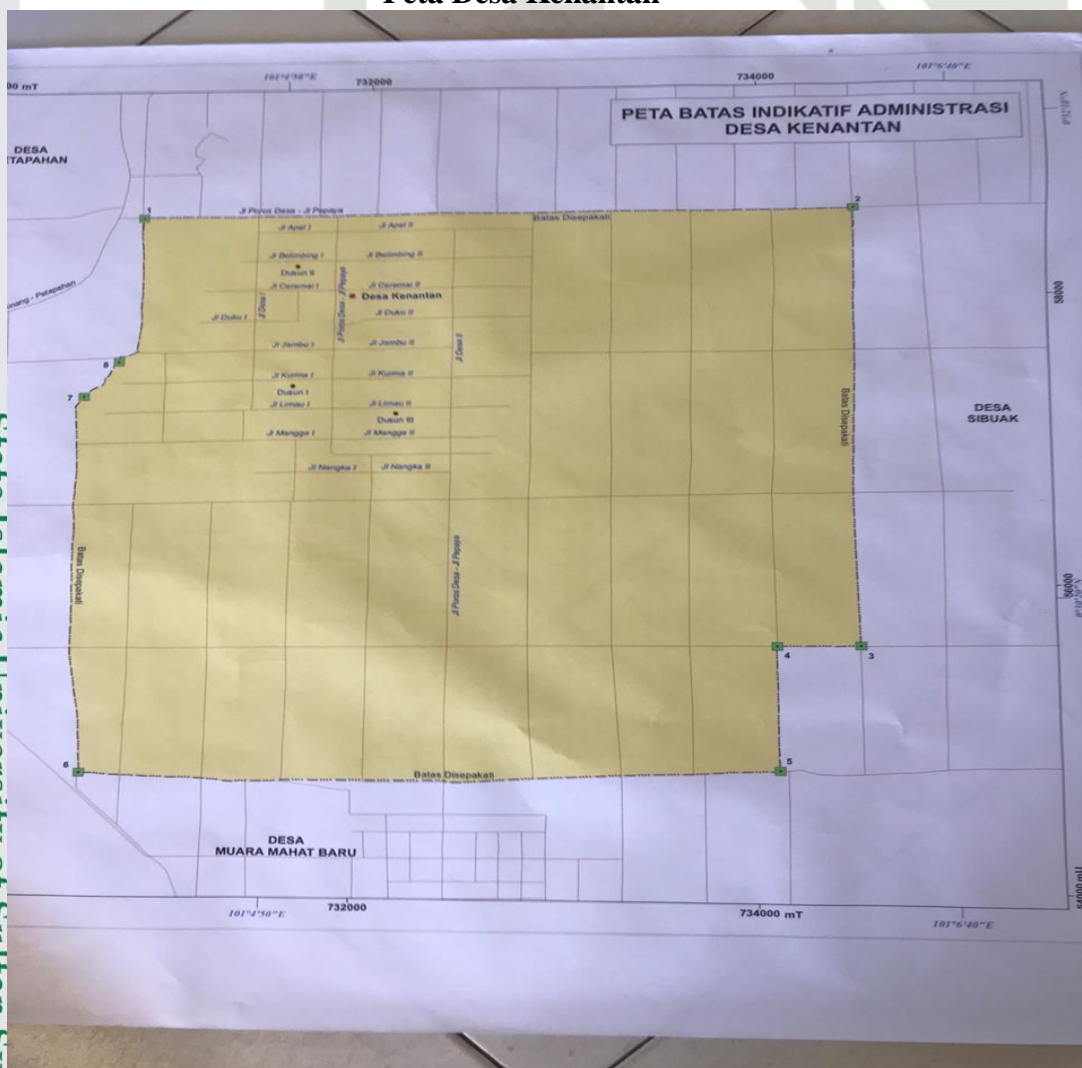
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.9 Organisasi Sosial Masyarakat Desa Kenantan

Beberapa organisasi sosial masyarakat Desa Kenantan, yaitu karang taruna, PKK, lembaga adat, posyandu, SATGAS LINMAS. Selain itu juga terdapat kelompok arisan dan baik berbentuk kelompok dan suku/kaum. Selain itu di bidang pertanian kebun kelapa sawit ada beberapa kelompok tani di Desa Kenantan, Dan berada pada naungan KUD Makmur Lestari Desa Kenantan.

4.10. Peta Desa Kenantan

Gambar 4.1
Peta Desa Kenantan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya penerapan prinsip *Good Governance* di dalam pengelolaan desa di desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan desa di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu seperti: masih kurangnya akses informasi yang di berikan masyarakat, tidak bertambahnya wawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan desa, kurangnya kritik dan saran yang di berikan untuk pemerintah Desa dan tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Desa di Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu: SDM yang kurang Mempuni, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan desa dan tidak sesuai pembangunan.

2. Saran

Adapun saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan kepada pemerintah desa Kenantan baik itu Kepala Desa ataupun anggota-anggota seperti sekretari desa, KAUR untuk mampu memaksimalkan prinsip *Good Governance* didalam pengelolaan desa khususnya dalam transparansi.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa Kenantan untuk membuat website ataupun sosial media yang bisa di akses masyarakat khususnya anak muda agar dapat mengawasi pemerintahan desa kenantan dalam keadaan apapun.
3. Diharapkan pemerintah desa bisa merangkul masyarakat agar dapat berpartisipasi dan menciptakan rasa peduli didalam pembangunan desa,

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Dari Buku:

Amasri, dan Muammar Alkadafi. 2018. *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru Cahaya Firdaus.

RAW Widjaja. 2004. *Otonomi Desa: merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan publik*. Depok. Rajawali Pers.

Joko Purnomo. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta. Infest.

Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Muslim, dan Larbiel Hadi. 2017. *Pelayanan Publik: konsep, Inovasi, & Semangat Anti Korupsi*. Pekanbaru. Kreasi Edukasi.

Nurcholis, hanif. 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.

Sedarmayanti. 2007. *Good goverenance (keperintahan yang baik) dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik)*. Bandung. Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2012. *APU, GOOD GOVERNANCE "Kepemerintahan Yang Baik"*, Bagian Kedua Edisi Revisi". Bandung: Mandar Maju

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dari Jurnal:

Ardin Dolok Saribu. (2017). *Pengaruh penerapan prinsip-prinsip good government governance terhadap efektivitas kinerja pegawai badan pengelolaan keuangan dan asset daerah pemerintahan kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Online Internasional & Nasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Vol 20.92-107.

Febby Rosielita, dkk. (2017). *Implementasi good governance pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa (studi kasus Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)*. Jurnal jurusan akuntansi. Vol 8.1-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



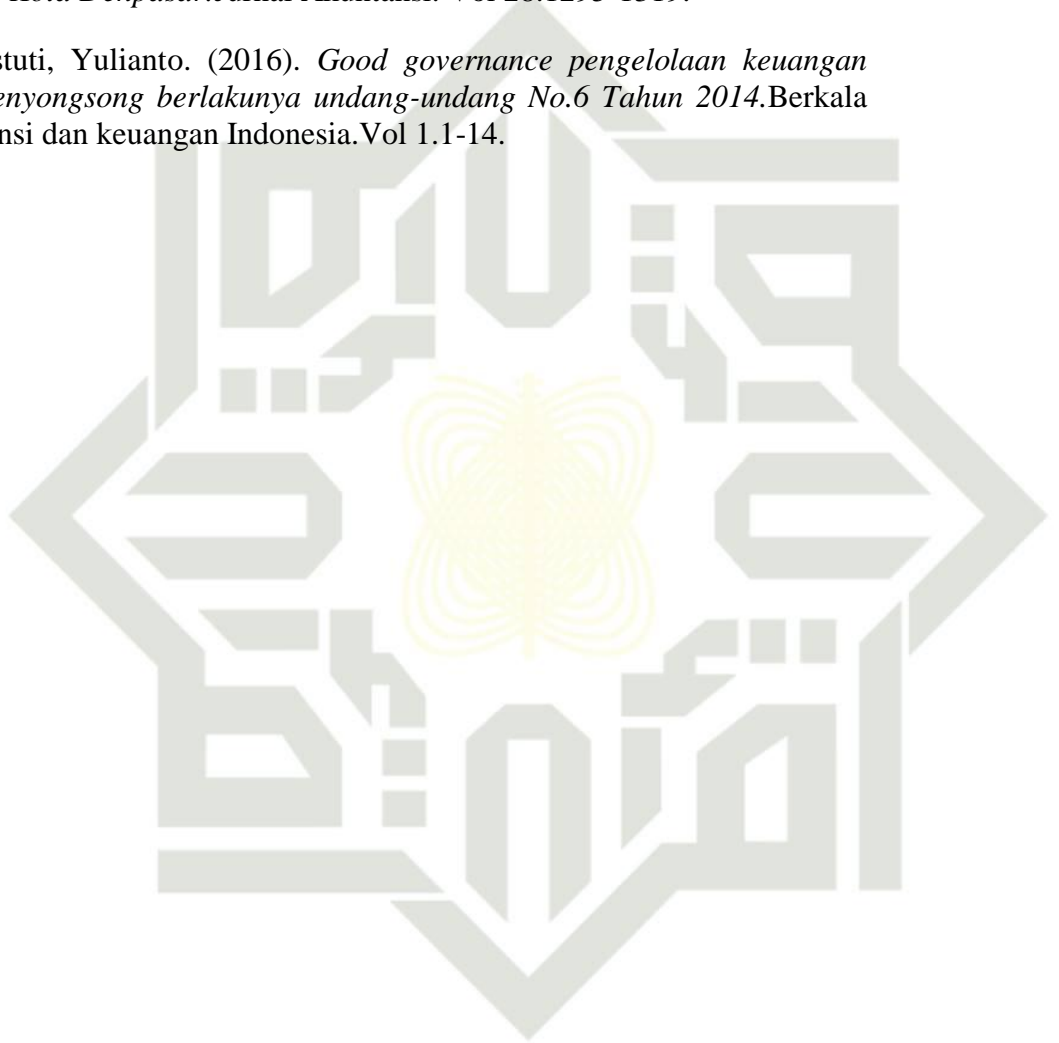
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadek Indah Widiyari, Asri Dwija Putri (2018). *Pengaruh good governance dan budaya organisasi terhadap kinerja manajerial penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung*. Jurnal akuntansi. Vol 22.1308-1329.

Putu Rika Raheni, Asri Dwija Putri. (2019). *Pengaruh good governance dan budaya organisasi pada kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan Desa di Kota Denpasar*. Jurnal Akuntansi. Vol 28.1295-1319.

Putri Puji Astuti, Yulianto. (2016). *Good governance pengelolaan keuangan Desamenyongsong berlakunya undang-undang No.6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi dan keuangan Indonesia. Vol 1.1-14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Foto Bersama Kepala Desa Kenantan Bapak Abdul Hanif



Foto bersama BPD Bapak Asrofi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Masyarakat Bapak Sariman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/8186/2019 Pekanbaru, 31 Desember 2019 M
Sifat : Biasa 4 Jumadil Awwal 1441 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Restu Adi Pratama
NIM : 11675101918
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Desa (Study Kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003




© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Ria



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAPUNG
KANTOR KEPALA DESA KENANTAN

Alamat : Jalan Pepaya No. 130 C Desa Kenantan Kode Pos 28464

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 NOMOR : 140/KN-PEM/2020/ **177**

Yang bertanda tangan di bawah ini : Kepala Desa Kenantan, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan ini menerangkan bahwa:


Nama	: RESTU ADI PRATAMA
Tempat/ tgl lahir	: Kampar, 17 Maret 1998
NIK	: 1401101703980004
Pekerjaan	: Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Alamat	: JL. Apel II RT 004 RW 003 Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Yang tersebut namanya diatas, telah selesai melakukan Penelitian Akademis dan Pengambilan Data untuk keperluan Penulisan Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA (studi kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kenantan, 22 Juni 2020

KEPALA DESA KENANTAN




ABDUL HANIF

Scanned by TapScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/2020/41
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/8090/2019 Tanggal 27 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: RESTU ADI PRATAMA
2. NIM / KTP	: 11675101918
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA (STUDI KASUS DESA KENANTAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR)
7. Lokasi Penelitian	: KANTOR DESA KENANTAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA Kode Pos : 28412

REKOMENDASI
 Nomor : 070/BKBP/2020/29

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/2020/41 tanggal 03 Januari 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama	: RESTU ADI PRATAMA
2. NIM	: 11675101918
3. Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang	: S1
6. Alamat	: PEKANBARU
7. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA (STUDI KASUS DESA KENANTAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR)
8. Lokasi	: KANTOR DESA KENANTAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr a riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 9 Januari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Kampus Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Restu Adi Pratama lahir di Kampar, 17 Maret 1998. Merupakan anak ke pertama dari dua bersaudara dari Bapak Sariman dan Ibu Wartini. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 031 Kenantan dan tamat pada tahun 2010. Dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan di SMPN 2 Tapung dan tamat pada tahun 2013. Dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota dan tamat pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurusan Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2016.

Pada tahun 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (kukerta) di Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Berkat Karunia dan Rahmat Allah SWT, penulis mengikuti ujian munaqasyah pada tanggal 21 Juli 2020 dengan judul Skripsi “*Analisis Prinsip Good Governace Dalam Pengelolaan Desa (studi kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)*”, dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.sos).